



ZONASI SEKOLAH

Penerimaan Siswa Gunakan Satelit

Sistem Zonasi PPDB 2018

- **Jarak Udara**
 - Pengukurannya berbasis aplikasi online.
 - Melibatkan vendor untuk menentukan kevalidan jarak antara rumah atau tempat tinggal dan sekolah.
 - Metode ini tidak menggunakan arus jalan sebagai ukuran jauh dekat dari tempat tinggal ke sekolah. Melainkan diukur melalui udara seperti layaknya di peta dengan tanpa penghalang.
 - Nantinya akan ditentukan pada titik nama dusun untuk empat kabupaten di DIY dan titik rukun warga (RW) untuk Kota Jogja yang sebelumnya sudah dipetakan.

Sumber: Disdikpora DIY

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akhirnya menggunakan jarak udara dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dengan sistem zonasi.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota

- ▶ Jarak udara akan mengambil titik tengah RW sebagai sentra pertimbangan jarak alamat di kartu keluarga calon siswa.
- ▶ Potensi lulusan SD tahun ini ada sekitar 7.000 siswa.

Jogja yang dikeluarkan beberapa hari ke depan.

Jarak udara dengan satelit dipilih karena dinilai ada kepastian dan lebih objektif. Berbeda dengan jarak darat yang bisa ditafsirkan berbeda-beda.

"Kami sudah petakan mulai dari SMP 1 sampai SMP 16 dengan jarak

616 RW di Kota Jogja melalui satelit," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edy Heri Suasana, saat ditemui di Taman Pintar, Senin (26/2).

Edy mengatakan jarak udara akan mengambil titik tengah RW sebagai sentra pertimbangan jarak alamat di kartu keluarga calon siswa. Saat PPDB nanti sekolah tinggal melihat

tabel yang sudah terpetakan jarak rumah dengan sekolah SMP yang dipilih.

Jika dalam satu RW itu terdapat empat siswa yang memilih SMP yang sama, kata Edy, selain persaingan jarak, nilai ujian akhir sekolah daerah (Uasda) yang menjadi pertimbangan. Pihaknya juga sudah memetakan potensi lulusan SD tahun ini ada sekitar 7.000 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 3.500 orang.

• Lebih Lengkap Halaman 10

Penerimaan Siswa...

Hasil pemetaan tersebut juga menunjukkan bahwa lulusan SD terbanyak ada di Kecamatan Ngampilan. Padahal Ngampilan tidak memiliki SMP negeri. Selain Ngampilan, Kecamatan Mergangsan dan Pakualaman juga tidak memiliki SMP negeri. Maka dipastikan lulusan SD dari ketiga kecamatan tersebut akan memilih sekolah SMP negeri di Jogja bagian utara karena jaraknya lebih dekat. "Persaingannya di utara akan semakin ketat," ujar Edy.

Untuk wilayah Jogja bagian timur dan tenggara yang tidak memiliki SMP negeri bisa mengakses SMP yang paling dekat, misalnya di SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 14 di Jalan Tentara Pelajar. Dinas Pendidikan akan mengupayakan mulai tahun depan di wilayah Jogja bagian timur ada satu SMP negeri.

Jalur Khusus

Meski menggunakan sistem zonasi sekolah, Dinas Pendidikan juga membuka peluang bagi siswa luar daerah yang ingin bersekolah di SMP negeri di Jogja dengan kuota 5%. Karena 90% jatah warga sekitar sekolah. Sekitar 5% lainnya kuota jalur khusus anak pejabat. "Anak-anak pejabat yang mendapat tugas rotasi dari PNS, TNI-Polri kan biasanya juga membawa anaknya untuk pindah

sekolah. Jadi kami sediakan," kata Edy.

Edy menambahkan dengan berlakunya sistem zonasi sekolah, tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Pihaknya juga sudah menata semua guru di SMP negeri. Guru-guru yang sebelumnya mengajar di SMP negeri yang dianggap favorit oleh masyarakat saat ini sudah disebar ke beberapa sekolah negeri lainnya di Jogja.

Dengan demikian, Edy memastikan sebaran guru akan merata. Selain sumber daya guru merata, berbagai fasilitas penunjang belajar juga sudah disamakan. Semua SMP negeri di Jogja kini sudah disediakan kendaraan operasional, komputer, LCD, dan kamera pemantau atau CCTV.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, yang membidangi pendidikan, Antonius Fokki Ardianto menyambut baik dengan penerapan sistem zonasi sekolah, karena bakal ada pemerataan dalam proses penerimaan peserta didik baru nantinya. Menurutnya, kewajiban guru adalah mendidik semua peserta didik apapun latar belakangnya. Fokki juga menilai sistem zonasi akan berimbas ke sekolah swasta.

"SMP swasta masih memiliki pasar untuk menampung sekitar 3.600 orang dari potensi lulusan SD tahun ini," kata Fokki.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005